



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka dipandang perlu dilakukan perencanaan pembentukan peraturan daerah dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat;
- b. bahwa program perencanaan pembentukan peraturan daerah didasarkan pada skala prioritas kebutuhan yang perlu mendapat skala prioritas dalam pembahasan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan: 1. Surat Bupati Nomor : 100.3.2/994 Pertanggal 05 Agustus 2024 tentang Penyampaian Propemperda Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024;
2. Hasil rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Aru bersama Tim penyusun Peraturan Pemerintah Daerah pada tanggal 06 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024.

- KESATU : Menyetujui Program Pembentukan peraturan daerah yang dibahas bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas tertera dalam Lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas setelah ditetapkan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan skala prioritas berdasarkan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Rencana Pembangunan Daerah, Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan serta Aspirasi Masyarakat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 15 Agustus 2024

WAKIL KETUA DPRD

KABUPATEN KEPULAUAN ARU



FENNY SILVANA LOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
 NOMOR : 7 TAHUN 2024
 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024
 TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

DAFTAR PROPEMPERDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI			DASAR ATURAN	OPD PEMRAKARSA	TAHUN PENGUSULAN	KET
			BARU/ LAMA	SUDAH DIBAHAS TAHAP I	NASKAH AKADEMIK	PENJEL ASAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN DAERAH SAKWARISA KABUPATEN KEPULAUAN ARU		LAMA	✓	SUDAH ADA		UU NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN PP 54 TAHUN 2017	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA	2015	Sudah harmonisasi di KANWIL Hukum dan Ham Pembahasan tingkat I dan II	
2.	PEDOMAN PEMBENTUKAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA		LAMA		SUDAH ADA		PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2006	DINAS PMD DAN BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA	2015	SUDAH PEMBAHASAN TINGKAT I	
3.	PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL		LAMA	✓	SUDAH ADA		PERMENDAGRI NOMOR 25 TAHUN 2019	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2015	PEMBAHASAN TINGKAT I	
4.	TEMPAT PEMAKANAN		LAMA	✓	SUDAH ADA		PP NOMOR 9 TAHUN 1987	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2015	PEMBAHASAN TINGKAT I	
5.	PENGELOLAAN SAMPAH		LAMA	✓	SUDAH ADA		UU NOMOR 18 TAHUN 2008	DINAS KESEHATAN	2020	PEMBAHASAN TINGKAT I	
6.	KAWASAN TANPA ROKOK		LAMA	-	SUDAH ADA		UU NOMOR 36 TAHUN 2009	DINAS KESEHATAN	2015		
7.	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU		LAMA	-	SUDAH ADA		PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2015		
8.	PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK		LAMA	✓	SUDAH ADA		UU NOMOR 18 TAHUN 2009	DINAS PERTANIAN	2015	PEMBAHASAN TINGKAT I	
9.	PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH		LAMA	-	SUDAH ADA		PERMENCUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2017	BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA	2015		
10.	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU		LAMA	-	SUDAH ADA		UU NOMOR 14 TAHUN 2000	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER SETDA	2017		

11.	PENYENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	LAMA	-	SUDAH ADA	UU NOMOR 25 TAHUN 2009	BAGIAN ORGANISASI SETDA	2017	
12.	RENCANA INDIK PEMBANGUNAN PARWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 2018-2028	LAMA	✓	SUDAH ADA	PP NOMOR 50 TAHUN 2011	BAGIAN PARWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2017	PEMBAHASAN TINGKAT I
13.	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LAMA	-	SUDAH ADA	PP NOMOR 22 TAHUN 2022	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2017	
14.	PEMBENTUKAN KECAMATAN ARU SELATAN TENGAH DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU	LAMA	-	SUDAH ADA	UU NOMOR 23 TAHUN 2014	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	2019	
15.	PEMBENTUKAN KECAMATAN ARU UTARA PESISIR DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU	LAMA	-	SUDAH ADA	UU NOMOR 23 TAHUN 2014	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	2019	
16.	PEMBENTUKAN KECAMATAN ARU SELATAN GWANABAY DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU	LAMA	-	SUDAH ADA	UU NOMOR 23 TAHUN 2014	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	2019	
17.	PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU Koba DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU	LAMA		SUDAH ADA	UU NOMOR 23 TAHUN 2014	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	2019	PEMBAHASAN TINGKAT I NAMUN DIPENDING TERKAIT ADMINISTRASI DILENGKAPI
18.	PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU WOKAM DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU	LAMA	✓	SUDAH ADA	UU NOMOR 23 TAHUN 2014	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	2019	
19.	PEMBENTUKAN KELURAHAN MUTIARA DI KECAMATAN PULAU-PULAU ARU	LAMA	✓	SUDAH ADA	PP NOMOR 73 TAHUN 2005	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	2019	PEMBAHASAN TINGKAT I
20.	PEMBENTUKAN KELURAHAN CENDRAWASIH DI KECAMATAN PULAU-PULAU ARU	LAMA	✓	SUDAH ADA	PP NOMOR 73 TAHUN 2005	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	2019	PEMBAHASAN TINGKAT I
21.	BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN	LAMA	✓	SUDAH ADA	UU NOMOR 16 TAHUN 2011	BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA	2020	SUDAH HARMONISASI PEMBAHASAN TINGKAT I
22.	TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	LAMA		SUDAH ADA	UU NOMOR 12 TAHUN 2011 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 13 TAHUN 2022	BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA	2020	

23.	PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI		LAMA	-	SUDAH ADA		PERPPRES NOMOR 95 TAHUN 2017	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2020	
24.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		LAMA	-	SUDAH ADA		PP NOMOR 28 TAHUN 2020 DAN PP NOMOR 27 TAHUN 2014	BPKAD	2020	
25.	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		BARU	-	SUDAH ADA		PP NOMOR 12 TAHUN 2019	BPKAD	2023	
26.	APBD-P TAHUN 2025		BARU	✓			PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2023	BPKAD	2024	
27.	PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2023		BARU	✓			PP 12 TAHUN 2019	BPKAD	2024	
28.	APBD PERUBAHAN TAHUN 2024		BARU	✓			PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2023	BPKAD	2024	
29.	PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS		BARU	-	BELUM ADA		UU NOMOR 8 TAHUN 2016	DINAS SOSIAL	2024	
30.	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM		BARU	-	BELUM ADA		PP NOMOR 54 TAHUN 2017	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	2024	
31.	PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PEJELANGAN IKAN		BARU	-	BELUM ADA		PP NOMOR 38 TAHUN 2007 DAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014	DINAS PERIKANAN TAHUN	2024	
32.	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL, PEMBUDDIDAYAAN IKAN KECIL, SERTA PENGOLA DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN SKALA KECIL		BARU	-	BELUM ADA		UU NOMOR 7 TAHUN 2016	DINAS PERIKANAN	2024	

33.	PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN AIR DAERAH AIR MINUM		BARU		SUDAH ADA		UU NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN PP 54 TAHUN 2017	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA	2024	
34.	PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH		BARU				UU NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN PP 18 TAHUN 2016	BAGIAN ORGANISASI SETDA	2024	
35.	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025-2045		BARU		BELUM ADA		UU NOMOR 43 TAHUN 2009	DINAS PERPUSTAKAAN	2024	
36.	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2023-2042		LAMA		SUDAH ADA		UU NO 26 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2023		2024	PEMBAHASAN TINGKAT I DAN TELAH DI HARMONISASI PADA KANWIL HUKUM

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 15 Agustus 2024

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU


FENNY SILVANA LOY